



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gubernur Suryo No.1 Sidoarjo Kode Pos 61211
Telepon. (031) 8921946,8921960,8921853 Faks. (031) 8941145
Email : setda@sidoarjokab.go.id Website : www.sidoarjokab.go.id

PENGUMUMAN PENDAFTARAN
Nomor : 027/10439/438.1.2.3/2021

Tentang

PENCANTUMAN BARANG/JASA PADA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
KOMODITAS PRODUK PAKAIAN DINAS

Bersama ini kami mengundang para Pelaku Usaha *Pakaian Dinas* untuk turut serta dalam proses pencantuman Barang/Jasa Katalog Elektronik Lokal. Adapun rincian produk, persyaratan Penyedia dan persyaratan produk adalah sebagai berikut:

A. Informasi Produk

Etalase Komoditas	Kategori	Sub Kategori
Pakaian Dinas	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Pakaian Sipil Harian (PSH) DPR
	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Pakaian Sipil Resmi (PSR) DPR
	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Pakaian Sipil Lengkap (PSL) DPR
	Pakaian Dinas Harian (PDH)	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) DPR
	Pakaian Khas Daerah	Pakaian Khas Daerah DPR
	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Pakaian Dinas Lapangan (PDL) DPR

B. Syarat Penyedia

1. Syarat Kualifikasi

I. Peserta Berbadan Hukum:

A. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia

- (1) Surat Izin Usaha: (SIUP/IUI) yang masih berlaku, dengan
 - a) KBLI 14111 (Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil);
 - b) KBLI 14120 (Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan)
 - c) Bidang lain yang sejenis
- (2) Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak
- (3) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor (workshop tempat jahit/produksi pakaian) dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa yang dibuktikan dengan :
 - a) Bukti kepemilikan tempat usaha/kantor;
 - b) Bukti perjanjian sewa menyewa tempat usaha/kantor;
 - c) Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan (SKDU/SKDP); atau

- d) Dokumen lainnya yang sejenis.
- (4) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
- a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); .
 - c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d) Kartu Tanda Penduduk.
- (5) Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:
- a) tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - b) akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini.
 - c) akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d) apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 2) dan/atau 3) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
- a) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - c) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
 - d) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
 - e) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - f) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - g) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

B. Syarat Kualifikasi Teknis:

- (1) Memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) penyediaan barang pada divisi 28 (kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi) paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - b) Penyediaan barang pada kelompok/grup dan 282 (pakaian jadi, kecuali pakaian dari bulu binatang) paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- (2) Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan pengalaman sebagaimana dimaksud pada butir 1) huruf a) dan b) diatas.
- (3) Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan).
- (4) Memiliki alamat usaha (kantor pusat/kantor cabang/workshop) di wilayah Kabupaten Sidoarjo

II. Penyedia Perorangan

A. Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Perorangan, meliputi:

- (1) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- (2) memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal;
- (3) mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;
- (4) menyetujui Pakta Integritas yang berisi :
 - a) tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - b) akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini.
 - c) akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d) apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 2) dan/atau 3) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:

- a) yang bersangkutan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- b) tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
- c) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
- d) tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- e) bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
- f) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

B. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Barang/Jasa Lainnya Penyedia Perorangan:

(1) Memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) penyediaan barang pada divisi 28 (kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi) paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- b) Penyediaan barang pada kelompok/grup dan 282 (pakaian jadi, kecuali pakaian dari bulu binatang) paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

(2) Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan pengalaman sebagaimana dimaksud pada butir 1) huruf a) dan b) diatas.

(3) Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan).

(4) Memiliki alamat domisili di wilayah Kabupaten Sidoarjo

2. Syarat Teknis

(1) Memiliki peralatan:

- Mesin Jahit dengan status kepemilikan milik sendiri/sewa/sewa beli.

- (2) Memiliki Tenaga Jahit/Tenaga Obras/Tenaga Neci/Tenaga Ukur **min. 2 (dua) Orang**
- (3) Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas :
- a) Calon Penyedia dapat melakukan penawaran terhadap Atribut dan Kelengkapan Pakaian dinas, sebagai berikut :
 1. keseluruhan Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas;
 2. sebagian Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas; dan/atau
 3. tidak menawar keseluruhan Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas
 - b) Jika menawar keseluruhan atau sebagian Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas maka wajib mengacu kepada Peraturan Bupati No. 82 Tahun 2017 tentang "Standar Pakaian Dinas Dan Atribut Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

C. Spesifikasi Teknis Produk

Spesifikasi teknis minimum produk adalah sebagai berikut:

- (1) Spesifikasi teknis yang ditawarkan harus **menyebutkan merk kain;**
- (2) Spesifikasi Teknis yang ditawarkan **sesuai dengan** Peraturan Bupati No. 82 Tahun 2017 tentang "Standar Pakaian Dinas Dan Atribut Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

D. Syarat Harga

Dokumen Penawaran Harga, terdiri dari :

1. Daftar Harga Satuan Pakaian Dinas
2. Surat Pernyataan Keabsahan/Kebenaran Informasi Produk Dan Harga

E. Mekanisme Pencantuman Barang/Jasa Katalog Elektronik

1. Pelaku Usaha yang berminat perlu memiliki akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) terlebih dahulu. Bagi Pelaku Usaha yang belum memiliki akun SPSE dapat melakukan proses pendaftaran melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) terdekat.
2. Selanjutnya, Pelaku Usaha dapat melakukan pendaftaran dan menyampaikan :
 - a. Upload scan bukti dokumen syarat Penyedia dan syarat Produk sebagaimana tersebut di atas.
 - b. Input informasi spesifikasi produk dan harga (per kabupaten/kota) pada aplikasi Katalog Elektronik.

Adapun Panduan Penggunaan aplikasi Katalog Elektronik dapat diunduh pada laman www.e-katalog.lkpp.go.id menu unduh.

3. Perlu kami sampaikan bahwa proses pencantuman Barang/Jasa Katalog Elektronik ini mengacu pada Surat Keputusan Deputi Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan

Sistem Informasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik yang dapat diunduh pada website www.jdih.lkpp.go.id.

4. Pendaftaran dan proses pencantuman barang/jasa ini tidak dibatasi waktu sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam website www.e-katalog.lkpp.go.id.
5. Untuk informasi lebih lanjut, Pelaku Usaha yang berminat dapat datang langsung ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Jl. Gubernur Suryo No. 1 Sidoarjo.

Bersama ini kami sampaikan agar para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan ini, wajib mematuhi Etika Pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Sidoarjo, 17 November 2021

KEPALA BAGIAN
PENGADAAN BARANG/JASA



Ditandatangani secara elektronik oleh

BUDI BASUKI, M.MT

NIP. 198005112002121002

BUDI BASUKI, ST., M.MT.

Pembina

NIP. 19800511 200212 1 002

Format Surat Pernyataan Keabsahan/Kebenaran Informasi Produk dan Harga

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN/KEBENARAN
INFORMASI PRODUK DAN HARGA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____ [nama wakil sah badan usaha]
Nomor Identitas : _____ [diisi nomor KTP/SIM/Paspor]
Jabatan : _____
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi/UD/Perorangan _____ [pilih yang sesuai
dan atas nama cantumkan nama]

dalam rangka penyelenggaraan Katalog Elektronik dengan ini menyatakan bahwa :

1. PT/CV/Firma/Koperasi/UD/Perorangan _____ bertanggung jawab atas informasi produk, spesifikasi teknis, gambar dan lampiran yang diunggah melalui Katalog Elektronik.
2. Telah memastikan bahwa seluruh materi, konten atau substansi yang diunggah bukan termasuk konten yang dilarang dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Bertanggung jawab atas laporan atau pengaduan mengenai konten yang diunggah.
4. Harga tayang produk merupakan harga terbaik untuk Pemerintah. Kami bertanggung jawab atas kewajaran harganya.
5. Menjamin garansi produk (sepanjang memiliki garansi dan tidak dilakukan modifikasi/perubahan yang mengakibatkan hilangnya garansi tersebut).
6. Membebaskan Pengelola Katalog atas tuntutan hukum dari pihak manapun akibat sengketa merek yang timbul atas produk yang ditawarkan.
7. Memberikan kewenangan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Pengelola Katalog Elektronik Lokal karena pertimbangan tertentu, untuk sewaktu-waktu menurunkan pencantuman produk dari Katalog Elektronik.
8. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pesanan *e-purchasing* katalog dan telah memastikan kesesuaian informasi barang/jasa yang diunggah pada Katalog Elektronik dengan yang dikirimkan ke Pemesan (Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan).
9. Mematuhi etika pengadaan dengan tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Seluruh data dan dokumen saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa data atau dokumen yang saya sampaikan tidak benar, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundangan.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya, penuh tanggung jawab, dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

[tempat], _____ [tanggal] [bulan] 20 ____ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi/UD/Perorangan _____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

*[rekatkan materai Rp 10.000,-
dan tanda tangan]*

(nama lengkap wakil sah badan usaha)

[jabatan dalam badan usaha]